

Muhammadiyah : Pemerintah Indonesia Harus Tegas dalam Menyikapi Kebijakan Trump

Rabu, 01-02-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Seperti diketahui perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang pengungsi dan warga Muslim dari tujuh negara untuk sementara masuk ke AS. Ketujuh negara tersebut antara lain Suriah, Irak, Iran, Libya, Sudan, Somalia dan Yaman.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, kebijakan yang diambil oleh Donald Trump terkait melarang Muslim masuk AS perlu ditinjau ulang.

Menurut Mu'ti, kebijakan tersebut akan berpotensi menimbulkan masalah baik di dalam negeri AS, Timur Tengah, dan dunia. Pasalnya, kebijakan Trump juga bertentangan dengan nilai multikulturalisme dan demokrasi yang selama ini menjadi komoditas politik AS.

Mu'ti menegaskan, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia menyampaikan sikap sebagai suatu bentuk solidaritas atas kebijakan Trump tersebut. "pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas terkait kebijakan tersebut sebagai negara mayoritas Islam. Meskipun kebijakan Trump tersebut tak menyentuh Indonesia," terang Mu'ti, Selasa (31/1).

Menurut Mu'ti, sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan politik luar negeri yang bebas Indonesia tidak perlu khawatir mengkritik AS. "Meskipun kebijakan imigrasi Trump tidak termasuk Indonesia namun bisa juga berdampak ke dalam negeri. Misalnya, sikap anti AS akan bermunculan dalam bentuk demonstrasi ataupun protes dalam bentuk lainnya," ungkap Mu'ti.

Selain itu, menurutnya Trump dapat merusak perdamaian Timur Tengah yang berusaha dibangun Presiden Barack Obama. "Trump dapat membuat situasi Timur Tengah semakin memanas dan penuh ancaman," tegasnya. **(adam)**